## PERJANJIAN PANGKALAN MILITER AMERIKA SERIKAT — FILIPINA DALAM KAITANNYA DENGAN KEAMANAN DI KAWASAN ASIA TENGGARA

## ABSTRAK SKRIPSI



OLEH

MARIA LUCIA DIAN PURWANDARI NRP 2870135 NIRM 87.7.004.12061.10858

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA SURABAYA 1992 Surabaya, 13 Oktober 1992 Mahasiswa yang bersangkutan

Jeagem-

Maria Lucia Dian Purwandari

Mengetahui

Dekan

Pembimbing

Daniel Djoko Tarliman, S.H. M.S.

\$ari/Mandiana, S.H. M.S.

J.M. Atik Krustiyati, S.H. M.S.

Pada tanggal 14 Maret 1947 disetujuilah Perjanjian Pangkalan militer Amerika Serikat-Filipina yang
diberi nama "The Military Bases Agreement", dimana
perjanjian ini merupakan perjanjian pokok yang mengatur
kehadiran pangkalan militer Amerika Serikat di Filipina
dan digunakan sebagai dasar bagi perjanjian-perjanjian
pangkalan militer selanjutnya.

Keadaan tersebut di atas semakin meningkat dengan disetujuinya "Perjanjian Persahabatan Dan Kerjasama 25 Tahun" antara Uni Sovyet dengan Vietnam pada bulan November 1978. Di dalam salah satu bagian dari perjanjian tersebut dinyatakan bahwa Vietnam mengijinkan Uni Sovyet menggunakan Cam Ranh Bay dan Da Nang sebagai Pangkalan Angkatan Laut dan Angkatan Udara Uni Sovyet. Sejak perjanjian tersebut disetujui terlihat adanya peningkatan operasi dan aktivitas angkatan laut dan angkatan udara Uni Sovyet di sepanjang perairan laut Cina Selatan, yang menjadi penghubung antara Samudera Hindia dengan kawasan Pasifik Barat. serta mempermudah hubungan operasi dan aktivitas militernya di kawasan Asia Pasifik dengan pusat pangfkalan armada pasifiknya di Vladiwostok.

Sebagai suatu negara yang sedang berkembang,
Filipina juga mempunyai kepentingan-kepentingan di dalam
hubungan Amerika serikat-Filipina. Kepentingankepentingan tersebut didasarkan pada kehidupan politik

dalam negeri Filipina yang seringkali mengalami gejolak, sehingga diharapkan Amerika Serikat bersedia memberikan bantuan, khususnya di bidang politik, militer dan ekonomi. Alasan inilah yang menyebabkan Filipina bersedia menyerahkan Subic Bay dan Clark field kepada Amerika Serikat untuk digunakan sebagai pangkalan militernya.

Menurut perjanjian antara Amerika SerikatFilipina pada tanggal 14 maret 1947, perjanjian tersebut berakhir pada tanggal 16 September 1991. Pada tanggal 27 Agustus 1991 di Manila, kedua negara telah menandatangani "Treaty of Friendship, Cooperation, and Security".

Menurut perjanjian tersebut Amerika Serikat akan menggunakan pangkalan laut Subic selama 10 tahun dengan pembayaran 360 juta dolar Amerika Serikat untuk tahun pertama dan 203 juta dolar Amerika Serikat setiap tahunnya selama 9 tahun berikutnya. Di samping itu, menurut perjanjian tersebut, Amerika Serikat akan memberi Filipina 353 juta dolar Amerika Serikat dan bantuan ekonomi 607 juta dolar Amerika Serikat.

Pada tahun 1991 Perjanjian Pangkalan Militer
Amerika Serikat-Filipina berakhir, meskipun keputusan
terakhir berada di tangan presiden Filipina, Corazon
Aquino, yang mengadakan referendum pada bulan Mei 1992.
Tetapi secara de facto perjanjian tersebut membawa
dampak bagi Filipina karena Filipina akan mengalami

kesulitan ekonomi dan destabilitas dalam negeri sebab keberadaan pangkalan militer sangat berarti bagi kedua bidang tersebut. Akibatnya akan terjadi pengolahan politik di dalam negeri dan secara tidak langsung akan berpengaruh di kawasan Asia Tenggara.

Bagi negara Asia Tenggara khususnya negara yang tergabung dalam organisasi ASEAN (Association of South East Asian Nations), penolakan pangkalan militer Amerika serikat tersebut memang merupakan cita-cita Zone of Peace, Freedom and Neutrality (ZOPFAN) yang tercetus Thn. 1971 di Kuala Lumpur. Wawasan ZOPFAN itu dirumuskan ketika dunia kita masih dicekam perang dingin. Salah satu asas penting adalah penolakan adanya pangkalan militer asing sebagai perwujudan persekutuan dengan satu blok terlibat perang dingin itu. Dengan mengkaji uraian di atas yang dinyatakan bahwa pangkalan militer Amerika Serikat di Filipina mempunyai andil dalam menstabilkan kawasan Asia Tenggara, sedangkan salah satu asas penting ZOPFAN adalah adanya pangkalan militer.

Dengan berakhirnya perjanjian tersebut baik cepat atau lambat situasi di kawasan Asia Tenggara akan menghangat, sebab dengan kehadiran pangkalan Amerika Serikat di Filipina memainkan peranan yang penting di dalam menjaga keamanan di kawasan Pasifik Barat. Ditariknya pangkalan Amerika Serikat dari Filipina akan menyebabkan negara-negara potensial seperti Jepang, India dan Cina

akan meningkatkan armadanya. Dan ini sangat berbahaya karena akan membuka kembali konflik di kawasan laut Cina Selatan. Sementara Malaysia dan Singapura telah menyatakan diri secara terbuka bahwa ia bersedia menggantikan Filipina. Disinipun terjadi persaingan yang bukan suatu hal hal yang mustahil akan terjadi perpecahan diantara negara-negara Asia Tenggara.

Bertolak dari uraian tersebut di atas, maka saya akan membatasi permasalahan yang ada. Adapun permasalahan saya adalah: "Benarkah ZOPFAN menjamin keamanan di kawasan Asia Tenggara dengan berakhirnya Perjanjian Pangkalan Militer Amerika Serikat di Filipina?"

Atas pertimbangan inilah saya menyusun skripsi dengan judul "Perjanjian Pangkalan Militer Amerika Serikat Filipina Dalam kaitannya dengan keamanan di kawasan Asia Tenggara". Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian yaitu: untuk memperoleh data-data yang dapat dipergunakan sebagai bahan penyusunan skripsi. Di samping itu penelitian tersebut dimaksudkan agar penyusunan skripsi ini dapat dipertanggung jawabkan.

Setelah melakukan penelitian, maka langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengadakan pendekatan masalah dengan menggunakan cara yuridis normatif. Untuk itu data yang dipergunakan berupa data sekunder yakni dokumen-dokumen yang meliputi kaidah-kaidah dari sumber-

sumber hukum internasional. Kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data dan pengolahan data yang menggunakan metode deduksi yaitu pengolahan data yang bertolak dari hal-hal yang umum menuju ke hal-hal yang khusus. Dalam arti bahwa Konvensi Wina 1969, Deklarasi Bangkok 1967, Deklarasi Kuala Lumpur 1971, MOU Amerika Serikat-Singapura 1990 dipakai sebagai landasan untuk menjawab permasalahan dalam skripsi ini. Dari pengolahan data ini kemudian dianalisis secara kwalitatif dengan mempergunakan sistematika kaidah-kaidah yang menjadi pangkal tolak analisis terhadap permasalahan yang diajukan.

Waktu penelitian dalam rangka penyusunan skripsi ini dilakukan melalui beberapa fase yang disesuaikan dengan obyek penelitian, yaitu:

Persiapan : September - Nopember 1991

Pengumpulan Data : Januari - April 1992

Analisis Data : April - Juni 1992

Laporan : Juni - Oktober 1992

Dari hasil penelitian tersebut adalah bahwa memang benar berakhirnya Perjanjian Pangkalan Militer Amerika Serikat Filipina mempunyai pengaruh terhadap keamanan dan pertahanan di kawasan Asia Tenggara. Pengaruh tersebut disebabkan adanya tawaran-tawaran dari Malaysia dan Singapura yang merupakan anggota ASEAN untuk menggantikan kedudukan Filipina. Hal ini perlu mendapat perhatian sebab sebagai anggota ASEAN yang

mempunyai suatu perjanjian (Deklarasi Bangkok 1967)
Malaysia dan Singapura mempunyai tanggung jawab yuridis
dan moral untuk mentaati segala isi yang tertuang dalam
Deklarasi Bangkok tersebut.

Obyek-obyek dan lokasi penelitian didapatkan dan dilakukan di :

- Departemen Luar Negeri Republik Indonesia Jakarta
- Kedutaan Besar Filipina Jakarta
- Kedutaanaan Besar Amerika Serikat Jakarta
- Sekretariat Nasional ASEAN Jakarta
- Sekretariat ASEAN Jakarta
- CSIS Jakarta
- Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Luar Negeri Jakarta

Dari uraian tersebut di atas, maka kesimpulan yang saya peroleh adalah :

Berdasarkan uraian dari bab-bab terdahulu yang membahas tentang "Perjanjian Pangkalan Militer Amerika Serikat-Filipina dalam kaitannya dengan keamanan di kawasan Asia Tenggara" maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

a. Perjanjian Pangkalan Militer Amerika Serikat-Filipina yang dibuat pada tanggal 14 Maret 1947 banyak dilatar belakangi oleh berbagai kepentingan masing-masing pihak. Amerika Serikat merasa berkepentingan untuk membendung masuknya pengaruh komunis dari Uni Soviet ke kawasan Asia, sememtara itu Filipina berkepentingan untuk meningkatkan keamanan dalam negeri dan membangun kekuatan ekonominya. Setelah mengalami beberapa kali pembaharuan guan memperpanjang berlakunya perjanjian, akhirnya dapa tanggal 16 September 1991 senat Filipina menolak untuk memperpanjang kembali berlakunya perjanjian tersebut. Hal ini membuat situasi politik di Asia Tenggara menghangat kembali.

- b. Perjanjian Pangkalan Militer Amerika Serikat-Filipina senantiasa mengalami perubahan dari waktu ke waktu sehubungan dengan kepentingan kedua belah pihak khususnya dalam hal peningkatan bantuan-bantuan yang diberikan oleh Amerika Serikat.
- c. Dengan berakhirnya Perjanjian Pangkalan Militer
  Amerika Serikat-Filipina tersebut ternyata membawa
  pengaruh positf maupun negatif baik bagi Amerika
  Serikat dan Filipina. Dan bagi negara-negara di Asia
  Tenggara, khususnya negara-negara yang tergabung
  dalam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN)
  berakhirnya perjanjian tersebut membawa akibat munculnya perbedaan persepsi ancaman keamanan di masingmasing negara Asia Tenggara. Oleh karena itu kelangsungan ZOPFAN sekarang ini perlu mendapat pemikiran
  yang serius.

Agar berakhirnya Perjanjian Pangkalan Militer
Amerika Serikat-Filipina tidak mempengaruhi stabilitas
keamanan di Asia Tenggara maka ASEAN perlu meningkatkan
peranannya yang konstruktif dalam mewujudkan kerjasama
dan stabilitas serta keamanan yang dilandasi oleh persamaan dan semangat yang saling menguntungkan dengan
berdasrkan pada konsep ketahanan nasional menuju ketahanan regional. Hal ini disebabkan ASEAN merupakan salah
satu organisasi regional yang mempunyai arti strategis
di kawasan Asia Tenggara.

Negara-negara anggota ASEAN diharapkan untuk memperkuat ketahanan nasional masing-masing baik bidang politik, ekonomi, sosial budaya, maupun di bidang keamanan sesuai dengan cita-cita dan aspirasi ASEAN selain itu perwujudan konsep ZOPFAN secepatnya direalisir.